

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana Dampak Dana Desa Terhadap Pemekaran Wilayah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 dengan studi kasus Nagari Rabi Jonggor. Yang dianalisis dengan konsep Peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 8 ayat (2) yang digunakan melalui beberapa pertimbangan yaitu Prakarsa masyarakat Desa, Asal usul, Adat istiadat, Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa serta Kemampuan dan Potensi Desa yang mencakup :

A. Alasan Pemekaran Nagari

Pembentukan daerah baru pada Nagari ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat guna percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga sebagai pendidikan politik bagi masyarakat serta membuka peluang kerja bagi masyarakat. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Dampak Dana Desa terhadap Pemekaran

Dana desa bersumber dari APBN yang akan diperuntukkan bagi desa yang kemudian ditranfer melalui Anggran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

dan pemberdayaan masyarakat. Kenagarian Rabi Jonggor sebagai nagari yang melakukan pemekaran menjadi tiga Nagari baru yaitu Nagari Bahoras, Nagari Seberang Kenaikan dan Nagari Ranah Magelang. Pada tahun 2016 pendapatan nagari ini mencapai 4,2 Milliar. Yang bersumber dari dana Nagari, pendapatan asli nagari, hasil aset nagari, beserta hasil pajak dan retribusi daerah. Sedangkan Pada Tahun 2017 perolehan dana nagari mengalami kenaikan yaitu 5,4 Milliar. Pemekaran yang terjadi pada saat ini bahwa dana desa yang diperoleh belum sepenuhnya menyelesaikan semua permasalahan nagari, karena masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksiapan masyarakat dalam menjalankan otonomi baru ini. Sehingga dengan adanya pemekaran maka muncul masalah-masalah baru dalam nagari karena banyaknya ketimpangan yang terjadi.

2. Dampak Pembagian Tanah Adat

Pemekaran yang terjadi memiliki dampak negatif pada pembagian tanah adat sehingga menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat, adanya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme serta persaingan elit politik desa. Pembagian nagari tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing yang akan mempengaruhi potensi dan pendapatan asli Nagari. Perbedaan potensi yang dimiliki oleh nagari pemekaran menimbulkan permasalahan baru yaitu kemandirian nagari akan sulit ditingkatkan. Persoalan yang terjadi dalam pembagian tanah adat atau batas wilayah administrasi ini yaitu belum sepenuhnya diselesaikan oleh pemerintah

mengenai batas wilayah. Sehingga berdampak kepada profil nagari baru yang belum memiliki kejelasan batas wilayah nagari.

3. Dampak dalam Pembentukan Lembaga Adat Nagari

Penyelenggaraan pemerintahan di tanah Minangkabau tidak akan pernah terlepas dari konsep “Tali Bapilin Tigo atau Tigo Tungku Sajarangan” yang memiliki arti bahwa kegiatan adat desa harus selalu berkaitan dengan lembaga adat desa yaitu pemerintahan ninik mamak, alim ulama, kerapatan adat nagari (KAN). Pada pemekaran Nagari ini belum adanya perubahan pada kondisi adat masyarakat Nagari Rabi Jonggor karena pemekaran Nagari tersebut masih pada wilayah administrasi. Hal ini peneliti merasa adanya ketidaklarasan antara peraturan yang mengatur terbentuknya daerah baru atau yang disebut sebagai otonomi daerah dengan kondisi yang terjadi pada Nagari. Dibuktikan dengan tidak adanya pembentukan pemerintahan adat pada nagari yang dimekarkan sesuai dengan Undang-Undang dan konsep yang dimiliki oleh masyarakat adat. Sehingga peneliti merasa bahwa pemekaran Nagari pada dasarnya belum siap untuk dimekarkan karena berbeda dengan aturan dalam undang-undang dan sumber daya manusia belum terpenuhi yaitu tidak membentuk perangkat adat Nagari. Kondisi ini akan menjadi polemik bagi masyarakat karena ketidaksiapan sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baru.

4. Dampak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemekaran Nagari yang terjadi di Nagari Rabi Jonggor menimbulkan dampak dalam aparatur pemerintahan yaitu sebagai perangkat Nagari di nagari yang dimekarkan. Dampak ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terlaksananya sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuan awal pemekaran itu sendiri. Adapun dampak buruk yang terjadi akibat ketidaksiapan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut adalah banyaknya persoalan dalam sumber daya manusia sebagai aparatur pemerintah menjadikan kemandirian Nagari lambat dalam menjalankan tugasnya.

5. Kelayakan Pemekaran Nagari Rabi Jonggor

Dengan banyaknya persoalan yang ditemui peneliti, sehingga peneliti merasa bahwa pemekaran Nagari ini belum layak dilaksanakan karena berdasarkan potensi yang dimiliki setiap nagari sangat kurang sehingga mempengaruhi kemandirian nagari kedepannya. Selain itu pemekaran ini dirasa tidak layak apabila hanya mengandalkan dana desa yang diberikan pemerintah daerah tanpa adanya penghasilan adat nagari. hal ini juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di nagari yaitu belum sepenuhnya siap menjalankan roda pemerintahan sementara perangkat nagari harus diisi oleh masyarakat nagari itu sendiri. Kesiapan sumber daya manusia ini juga mempengaruhi adat istiadat yang ada sejak dahulunya, karena untuk berdirinya otonomi baru atau nagari baru harus

memiliki sumber daya manusia yang paham dengan adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat nagari Rabi Jonggor.

B. Kelebihan dan Kelemahan Pemekaran

1. Kelebihan Pemekaran

Kelebihan dari pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor adalah adanya potensi lokal yang dimiliki di berbagai daerah sehingga apabila dikelola oleh Nagari dan dikembangkan dengan baik maka akan menjadi sumber perekonomian bagi masyarakat sehingga kemajuan masyarakat semakin meningkat. Selain itu pemekaran Nagari ini juga dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan.

2. Kelemahannya Pemekaran

Kelemahannya adalah Pemekaran wilayah di Nagari ini dikhawatirkan hanya akan menjadi alat dalam memenuhi kepentingan para penguasa yang memang dari awal menginginkan adanya pemekaran wilayah di Nagari Rabi Jonggor. Adapun kelemahan yang lain adalah kurangnya persiapan masyarakat dalam menyambut pemekaran Nagari karena masih banyak masyarakat yang belum tau bahwa adanya pemekaran yang sebelumnya hanya satu kesatuan nagari hingga kini menjadi 3 Nagari dengan 1 Nagari induk meskipun pemekaran ini tidak akan

menyebabkan perpecahan pada masyarakat setempat. Dengan demikian, pemekaran mempengaruhi kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan pemerintahan terutama sebagai aparatur pemerintahan.

SARAN

Dari hasil penelitian diatas, berangkat dari segala permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan maka penulis menyarankan untuk :

1. Perlu adanya pembagian fokus penanggung jawab nagari yang telah dimekarkan agar terfokus dalam menjalankan tupoksi di nagari
2. Pemerintah Nagari Rabi Jonggor harus melakukan monitoring dan evaluasi yang masif demi memaksimalkan kinerja perangkat nagari dalam menjalankan tupoksinya
3. Perlu adanya peningkatan metode perekrutan perangkat nagari sehingga perangkat nagari adalah orang yang paham akan sistem pemerintahan
4. Pemerintah Nagari harus segera menyelesaikan pembagian batas wilayah nagari agar tidak menimbulkan keraguan bagi masyarakat
5. Pemerintah Nagari harus menciptakan pelayanan yang lebih baik demi kenyamanan masyarakat
6. Menciptakan sumber daya manusia agar mampu mengelola pemerintahan serta potensi yang ada di Nagari